

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN



**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN
(LKPJ) - PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2019**

**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2019**



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jl. Rimbo Panjang - Salido Telp. (0756) 21080 Fax. (0756) 465208

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : ZULFIAN APRIYANTO, SH, M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. HENDRAJONI, S.H., M.H.
Jabatan : BUPATI PESISIR SELATAN

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

BUPATI PESISIR SELATAN

dto

H. HENDRAJONI, S.H., M.H.

Painan, 27 Februari 2019

Pihak Pertama

KEPALA DINAS SOSIAL PprPA
KAB. PESISIR SELATAN

dto

ZULFIAN APRIYANTO, SH, M.Si
NIP. 19651116 198602 1 002

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

A. URUSAN WAJIB

Gambaran Umum Bidang Sosial (Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)

Pembangunan kesejahteraan sosial dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi masyarakat, melalui redistribusi hasil-hasil pembangunan yang diwujudkan dalam kegiatan penanganan masalah-masalah sosial terutama bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Meskipun telah dicatat banyak keberhasilan, namun beberapa masalah masih harus mendapat perhatian.

Tugas pemerintah dalam melaksanakan pembangunan kesejahteraan sosial diantaranya memelihara, membimbing dan meningkatkan usaha kesejahteraan sosial, memupuk, dan meningkatkan kesadaran, rasa tanggung jawab sosial masyarakat serta melakukan pengamanan dan pengawasan pelaksanaan usaha-usaha kesejahteraan sosial. Usaha-usaha pemerintah di bidang kesejahteraan sosial meliputi bantuan sosial baik bagi perseorangan maupun kelompok yang mengalami kehilangan peranan sosial atau menjadi korban bencana, memelihara taraf kesejahteraan sosial melalui penyelenggaraan sistem jaminan sosial, melakukan bimbingan, pembinaan, rehabilitasi sosial termasuk penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat yang terganggu kemampuannya untuk mempertahankan hidup, serta melaksanakan penyuluhan sosial untuk meningkatkan peradaban, perikemanusiaan dan kegotongroyongan.

Pencapaian pembangunan bidang kesejahteraan sosial perlu didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai, sehingga dapat diperkirakan akan menghasilkan berbagai jangkauan pelayanan dan pemberdayaan sosial yang lebih luas bagi anak terlantar, termasuk di dalamnya anak jalanan dan anak cacat, serta pemberian santunan bagi lanjut usia terlantar, telah meningkatnya jumlah keluarga fakir miskin dan PMKS lainnya yang diberdayakan, sehingga mereka dapat hidup secara mandiri dan mampu mengatasi masalah yang dihadapi. Dalam hal kualitas perlindungan dan jaminan sosial, termasuk pengembangan sistemnya, diharapkan mampu menjangkau seluruh masyarakat termasuk penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Permasalahan kesejahteraan sosial yang akan dihadapi masih diwarnai dengan berbagai permasalahan sosial seperti kemiskinan dan keterlantaran, ketunaan sosial, kecacatan, keterpencilan, korban tindak kekerasan, akibat bencana alam dan bencana sosial, penyalahgunaan napza dan penyimpangan perilaku yang membutuhkan penanganan secara komprehensif dan berkelanjutan. Selain itu, permasalahan aktual yang terkait dengan kelangsungan kehidupan kenegaraan seperti disintegrasi sosial, kesenjangan sosial, perlu pula memperoleh perhatian dan penanganan yang serius.

Permasalahan-permasalahan ini perlu ditangani secara serius untuk menghindarkan kemiskinan struktural, perilaku anti sosial, kondisi disharmoni, kerawanan sosial dan tindak kejahatan yang akan menjadi pemicu terjadinya disintegrasi sosial. Hal ini akan menjadi beban sosial masyarakat dan pemerintah.

Pemerintah bertekad untuk mengatasi berbagai permasalahan sosial dengan melaksanakan berbagai program/kegiatan bidang sosial dan meningkatkan koordinasi lintas sektor serta meningkatkan kerjasama baik dengan pemerintah pusat, propinsi maupun Kabupaten/Kota.

B. Program dan Kegiatan.**Urusan : SOSIAL****SKPD : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

NO	URUSAN/ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATA	BELANJA		
		ANGGARAN	REALISASI	%
1	URUSAN SOSIAL			
	1. DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
	1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	412,516,276	408,230,947	98,96
	1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	33,480,000	31,521,295	94,15
	2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	89,964,900	88,060,000	97,88
	3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	96,473,757	96,473,590	100,00
	4 Penyediaan Alat Tulis Kantor	32,829,795	32,819,086	99,97
	5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12,500,801	12,450,795	99,60
	6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8,517,023	8,516,545	99,99
	7 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per-Undang-Undangan	7,680,000	7,320,000	95,31
	8 Penyediaan Makanan dan Minuman	21,720,000	21,719,636	100,00
	9 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	44,000,000	44,00,000	100,00
	10 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	65,350,000	65,350,000	100,00
	2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	333,065,000	330,135,286	99,12
	1 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	36,350,000	36,150,000	99,43
	2 Pengadaan Peralatan Gedung kantor	35,000,000	34,924,090	99,78
	3 Pengadaan Mubiller kantor	7,100,000	7,100,000	100,00
	4 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	37,300,000	37,295,000	99,99
	5 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional.	209,865,000	207,216,696	98,74
	6 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	7,450,000	7,449,500	99,99
	3 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	655,255,191	643,173,797	98,16
	1 Penunjang Operasional Program Keluarga Harapan (PKH)	65,933,191	65,739,946	99,71
	2 Verifikasi dan Validasi Data Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD	18,837,000	17,953,000	95,31

	3	Pelayanan Orang Terlantar	51,815,000	46,386,300	89,52
	4	Pengembangan Sistim Layanan dan Rujukan Terpadu Kabupaten Pesisir Selatan	518,670,000	513,094,551	98,93
	4	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	246,845,400	241,371,900	97,00
	1	Penanganan Masalah Strategis tentang Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa	144,090,000	139,065,650	96,51
	2	Monitoring, Evaluasi dan Kebijakan BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai)	52,459,600	51,635,800	98,43
	3	Bimbingan Sosial Bagi Penerima Bantuan KUBE Fakir Miskin	52,296,800	50,670,450	96,89
	5	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	110,460,000	108,140,750	97,90
	1	Bimbingan Sosial dan Pendampingan Jaminan Sosial bagi Penyandang Cacat Berat	110,460,000	108,140,750	97,90
	6	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	117,336,800	116,175,600	99,01
	1	Penguatan Kualitas Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) Kabupaten Pesisir Selatan	117,336,800	116,175,600	99,01
	7	Program Penanaman Nilai-Nilai Kepahlawanan dan Keperintisan	114,796,480	110,212,000	96,01
	1	Sarasehan Penanaman Nilai-Nilai Kepahlawanan bagi Generasi Muda	30,159,800	29,840,098	98,94
	2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepahlawanan dan Keperintisan	79,349,400	78,038,500	98,35

C. REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN

Urusan Sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan anggaran sebesar Rp. 2.698.889.708,- terealisasi sebesar Rp. 2.490.548.462,- atau 94,01 %

Rincian Program dan Kegiatan sebagai berikut :

- 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor, Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor, Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, Kegiatan Penyediaan Makan Minum, Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi Luar Daerah dan Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi Dalam Daerah.)**

Program ini bertujuan untuk menyediakan kebutuhan operasional administrasi perkantoran untuk memperlancar kegiatan dan pelayanan. Program ini dianggarkan sebesar Rp. 412.516.276,- realisasi sebesar Rp. 408.230.947,- atau 98,96%

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor, Kegiatan Pengadaan Meubiler, Kegiatan Pemeliharaan Gedung Kantor, Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor, Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional, Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor)

Program ini bertujuan meningkatkan pelayanan dengan melengkapi kebutuhan sarana dan prasarana kantor agar kegiatan berjalan dengan baik sesuai dengan perencanaannya. Program ini dianggarkan sebesar Rp. 333.065.000,- terealisasi sebesar Rp. 330.135.286,- (99,12%).

3. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya

Kegiatan Penunjang Operasional Program Keluarga Harapan

Kegiatan ini bertujuan menyediakan kebutuhan operasional penyaluran bantuan dan jaminan sosial Program PKH di Kabupaten Pesisir Selatan, dengan anggaran sebesar Rp. 65.933.191,- realisasi sebesar Rp. 65.739.946,- atau 99,71%.

Hasil dari kegiatan ini adalah tersalurkannya bantuan dan jaminan sosial Program PKH di Kabupaten Pesisir Selatan dan terlaksananya monitoring dan evaluasi terhadap bantuan Program PKH di Pesisir Selatan.

Dampak dari kegiatan ini adalah tercapainya penyaluran bantuan Program PKH yang tepat sasaran.

Kegiatan Pelayanan Orang Terlantar di Perjalanan

Kegiatan ini bertujuan untuk menyediakan biaya penanggulangan orang terlantar, mayat terlantar dan pembayaran premi asuransi ODGJ, dengan anggaran sebesar Rp. 51.815.000,-, realisasi sebesar Rp. 46.386.300,- atau 89,52%.

Hasil dari kegiatan ini adalah tertanggulangnya orang terlantar, mayat terlantar dan ODGJ.

Dampak dari kegiatan ini adalah meningkatnya pelayanan terhadap orang terlantar, mayat terlantar dan ODGJ.

Kegiatan Verifikasi dan Validasi Data PBI APBD

Kegiatan ini bertujuan untuk memverifikasi dan validasi data penerima PBI APBD, dengan anggaran sebesar Rp. 18.837.000,- realisasi sebesar Rp. 17.953.000,- atau sebesar 95,31%. Hasil dari kegiatan ini adalah terverifikasinya data penerima PBI APBD.

Dampak dari kegiatan ini adalah tersedianya data penerima PBI APBD yang valid.

Kegiatan Pendampingan Bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Fakir Miskin

Kegiatan ini bertujuan untuk pembinaan dan pendampingan bantuan Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin, dengan anggaran sebesar Rp. 55.724.898,- realisasi sebesar Rp. 53.805.950,- atau sebesar 96,56%. Hasil dari kegiatan ini adalah terbinanya penerima bantuan Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin.

Dampak dari kegiatan ini adalah meningkatnya pemanfaatan bantuan Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin.

Kegiatan Pengembangan SLRT Kabupaten Pesisir Selatan

Kegiatan ini bertujuan untuk fasilitasi Sistem Layanan Rujukan Terpadu Kabupaten Pesisir Selatan, dengan anggaran sebesar Rp. 201.811.546,- realisasi sebesar 196.81.750,- atau sebesar 97,52%. Hasil dari kegiatan ini adalah terfasilitasinya permasalahan fakir miskin. Dampak dari kegiatan ini adalah tercapainya bantuan yang tepat sasaran.

Kegiatan Verifikasi dan Validasi Basis Data Terpadu

Kegiatan ini bertujuan untuk verifikasi dan validasi Basis Data Terpadu, dengan anggaran sebesar Rp. 477.620.528,- realisasi sebesar 444.766.400,- atau sebesar 93,12%. Hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya data BDT yang telah diverifikasi. Dampak dari kegiatan ini adalah tercapainya bantuan yang tepat sasaran.

4. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Kegiatan Penanganan Masalah Strategis tentang Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pelayanan terhadap kejadian luar biasa berupa bencana alam dan bencana sosial serta penyediaan logistik bencana. Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp.235.518.667,- dan realisasi sebesar Rp. 229.794.020,- (97,57%).

Hasil dari kegiatan ini adalah terpenuhinya biaya penanganan bencana alam dan bencana sosial dan pemberian bantuan berupa logistik. Dampak dari kegiatan ini adalah tercapainya penanganan tanggap darurat tentang kejadian luar biasa berupa bencana alam dan bencana sosial.

Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Kebijakan Perberasan (Raskin)

Kegiatan ini bertujuan untuk monitoring dan evaluasi penyaluran beras sejahtera (rastra) di Kabupaten Pesisir Selatan. Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 73.770.835,- dan realisasi sebesar Rp. 64.234.250,- atau 87,07%.

Hasil dari kegiatan ini adalah tersalurkannya bantuan beras sejahtera tepat sasaran. Dampak dari kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan pangan keluarga miskin.

5. Program Pembinaan para Penyandang Cacat Trauma.

Kegiatan Bimbingan Sosial dan Pendampingan Jaminan Sosial Penyandang Cacat Berat.

Program ini bertujuan untuk pembinaan dan pendampingan para penerima jaminan sosial penyandang cacat berat disetiap kecamatan serta menyediakan uang transportasi dan akomodasi para pendamping dalam rangka pertemuan di kabupaten dengan anggaran sebesar Rp 64.000.261,- dan realisasi sebesar Rp. 63.511.600,- atau 99,24 %.

Hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya keperluan penyandang cacat berat penerima jaminan sosial pusat. Dampak dari program ini adalah terbinanya para cacat berat penerima jaminan sosial pusat.

6. Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo.

Kegiatan Penyediaan Bahan Sembako Anak dalam Panti

Kegiatan ini bertujuan untuk menyediakan bahan sembako bagi anak panti sebanyak 8 panti dengan jumlah anak 80 orang selama 12 bulan serta biaya operasional lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 318.548.618,- realisasi sebesar Rp. 283.491.200,- atau 88,99%

Hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya kebutuhan sembako bagi anak dalam panti asuhan. Dampak kegiatan ini adalah terbinanya panti asuhan di Pesisir Selatan.

7. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Kegiatan Penguatan Kelembagaan Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS)

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia pengelola Lembaga Koordinator Kesejahteraan Sosial (LKKS) dengan anggaran sebesar Rp. 151.610.367,- terealisasi sebesar Rp. 147.038.368,- atau sekitar 96,98 %

Hasil dari kegiatan ini adalah meningkatnya SDM pengelola LKKS dan terfasilitasinya operasional kegiatan LKKS Kabupaten Pesisir Selatan. Dampak dari Program ini adalah meningkatnya kualitas kelembagaan koordinasi kesejahteraan sosial di Pesisir Selatan.

8. Program Penanaman Nilai – Nilai Kepahlawanan bagi Generasi Muda

Kegiatan Sarasehan Penanaman Nilai Nilai Kepahlawanan bagi Generasi Muda

Kegiatan ini bertujuan untuk menambah pengetahuan generasi muda terhadap sejarah perjuangan dalam merebut kemerdekaan, serta menghormati dan menghargai para pahlawan kita baik yang telah meninggal maupun yang masih hidup dengan anggaran sebesar Rp. 34.185.088,- realisasi sebesar Rp. 31.673.100,- atau sekitar 92,65 %

Hasil dari kegiatan ini adalah meningkatnya pengetahuan generasi muda tentang nilai-nilai kepahlawanan dan keperintisan melalui sarasehan.

Dampak program ini adalah terciptanya generasi yang menghargai nilai-nilai kepahlawanan dan keperintisan.

Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepahlawanan dan Keperintisan

Program ini bertujuan untuk pemeliharaan Taman Makam Pahlawan yang berlokasi di Nagari Sago Kecamatan IV Jurai dan Makam Pahlawan Nasional yang berlokasi di Kecamatan Bayang dengan anggaran sebesar Rp. 80.611.392,- realisasi sebesar Rp. 78.538.900,- atau 97,43 %

Hasilnya adalah terpeliharanya Taman Makam Pahlawan dan Makam Pahlawan Nasional Ilyas Yacub. Dampaknya adalah terpeliharanya nilai-nilai kepahlawanan melalui pemeliharaan makam pahlawan.

D. PERMASALAHAN DAN SOLUSI.

Permasalahan yang terdapat dalam pelaksanaan program dan kegiatan tersebut adalah keterlambatan dalam pelaksanaannya sehingga tidak sesuai dengan pelaksanaan yang telah direncanakan, permasalahan secara umum dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Tidak semua kelompok masyarakat yang dapat dilayani mengingat keterbatasan keuangan Pemerintah Daerah.
- b. Kabupaten Pesisir Selatan termasuk salah satu daerah rawan bencana di Sumatera Barat yang hampir setiap tahun mengalami bencana, maka perlu persiapan bantuan kepada korban bencana dan diperlukan perhatian dan penanganannya secara khusus

Solusi atau tindakan yang akan dilaksanakan adalah :

- a. Memperluas jangkauan pelayanan peningkatan kemampuan keterampilan bagi masyarakat sehingga mampu memenuhi kebutuhannya sendiri
- b. Meningkatkan potensi dan partisipasi PSKS.
- c. Meningkatkan pelayanan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial.
- d. Melindungi masyarakat dari ancaman bencana dan pasca bencana.

1. URUSAN WAJIB

A. Gambaran Umum Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Masalah Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berkaitan dengan pengarusutamaan gender, peningkatan kualitas hidup perempuan, perlindungan anak dan pemenuhan hak anak, tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak. Hal ini coba diatasi oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melalui fasilitasi pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Penyusunan Dokumen Anggaran Responsif Gender dan Pembinaan Kelembagaan PUG dan Perlindungan Anak.

B. Program dan Kegiatan.

Urusan : Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

SKPD ; Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NO	URUSAN/ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATA	BELANJA		
		ANGGARAN	REALISASI	%
14	URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
	1. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	405,974,109	289,610,609	69,91
	1. Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A)	67,060,000	65,918,250	98,30
	2. Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak	29,496,509	29,421,509	99,75
	3. Pemberdayaan Kelembagaan Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten	49,757,600	44,970,100	90,38
	4. Pemberdayaan Kelembagaan BKMT Kabupaten	193,975,000	78,136,300	40,28
	5. Pemberdayaan Kelembagaan Dharmawanita Persatuan Kabupaten	69,685,000	68,164,450	97,82
	2 PROGRAM PERLINDUNGAN ANAK	109,914,900	108,854,775	99,04
	1. Pembinaan Nagari Layak Anak	109,914,900	108,854,775	99,04
	3 Program Penguatan dan Pembangunan Kelembagaan beserta Jaringan dan Penyusunan Regulasi Daerah	136,427,700	134,986,200	98,94
	1. Pembinaan Kelembagaan PUG dan Perlindungan Anak.	74,479,600	73,591,100	98,81
	2. Penyusunan Anggaran Responsif Gender	30,315,600	29,830,100	98,40
	4. Pengembangan Fasilitasi Forum Anak Daerah	31,632,500	31,565,000	99,79
	4 Program Pengembangan Data/Informasi	5,000,000	4,990,000	99,80
	1. Penyebarluasan Informasi Pembangunan	5,000,000	4,990,000	99,80

C. REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN

1. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A)

Kegiatan ini bertujuan untuk memfasilitasi P2TP2A sebagai lembaga yang berfungsi melakukan advokasi dan pendampingan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 73.514.022,- realisasi sebesar Rp. 60.803.500,- atau 82,71%.

Hasil dari kegiatan ini adalah terfasilitasi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak Kabupaten Pesisir Selatan. Dampak dari kegiatan ini adalah menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak

Kegiatan ini bertujuan untuk menyediakan profil gender dan anak Kabupaten Pesisir Selatan. Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 31.525.006,-, realisasi sebesar Rp. 30.625.000,- atau 97,15%.

Hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya buku profil gender dan anak. Dampak dari kegiatan ini adalah mendukung pengimplementasian pengarusutamaan gender melalui ketersediaan data terpilah gender dan anak Kabupaten Pesisir Selatan.

2. Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan/ Nagari

Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan GOW Kabupaten, Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Dharmawanita Dharmawanita Persatuan Kabupaten dan Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan BKMT Kabupaten

Program Peningkatan Peran Perempuan di Kelembagaan GOW, Dharmawanita Persatuan dan BKMT. Program ini bertujuan untuk meningkatkan peran perempuan dalam kelembagaan Gabungan Organisasi Wanita, Dharmawanita Persatuan dan Badan Kontak Majelis Taklim. Program ini dianggarkan sebesar Rp. 226.245.718,- realisasi sebesar Rp. 217.555.350,- atau 96,16 %

Hasil dari program ini adalah meningkatnya peran dan partisipasi perempuan dalam organisasi kewanitaan GOW, DWP dan BKMT.

Dampak program ini adalah meningkatnya kualitas hidup perempuan melalui fasilitasi kelembagaan perempuan.

3. Program Perlindungan Anak

Kegiatan Pembinaan Nagari Sayang Anak.

Kegiatan ini bertujuan untuk mempersiapkan dan Fasilitasi Nagari Layak Anak menuju Kabupaten Layak Anak. Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 71.779.492,- realisasi sebesar Rp. 62.241.301,- atau sekitar 86,71%.

Hasil dari kegiatan ini adalah terpenuhinya hak anak melalui pembinaan Nagari Layak Anak. Dampak dari kegiatan ini adalah meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak dan tercapainya prediket Kabupaten Layak Anak.

4. Program Penguatan dan Pembangunan Kelembagaan beserta Jaringan dan Penyusunan Regulasi Daerah

Kegiatan Pembinaan Kelembagaan PUG dan Perlindungan Anak.

Kegiatan ini bertujuan untuk implementasi pengarusutamaan gender dalam pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 83.297.928,- dengan realisasi sebesar Rp. 77.923.367,- Hasil dari kegiatan ini adalah terbinanya kelembagaan PUG pada setiap perangkat daerah. Dampak kegiatan ini adalah tercapainya pengarusutamaan gender pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

Kegiatan Penyusunan Anggaran Responsif Gender

Kegiatan ini bertujuan untuk implementasi pengarusutamaan gender dalam pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan khususnya dalam penganggaran responsif gender. Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 26.309.867,- dengan realisasi sebesar Rp. 23.220.280,-. Hasil dari kegiatan ini adalah tersusunnya Anggaran Responsif Gender dalam bentuk dokumen GAB dan GBS pada anggaran perangkat daerah. Dampak kegiatan ini adalah tercapainya pengarusutamaan gender pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

Kegiatan Pengembangan Fasilitas Forum Anak Daerah

Kegiatan ini bertujuan untuk melaksanakan pemenuhan hak anak dalam fasilitas kelembagaan Forum Anak Daerah. Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 69.114.949,- dengan realisasi Rp. 61.920.970,- atau 89,59%.

Hasil dari kegiatan ini adalah terfasilitasinya Forum Anak Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Dampak dari kegiatan ini adalah terpenuhinya hak anak dalam kelembagaan Forum Anak Daerah.

D. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan program diatas adalah kurangnya pemahaman perangkat daerah tentang isu Pengarusutamaan Gender dan Penganggaran Responsif Gender pada masing-masing Perangkat Daerah sehingga tujuan program ini belum maksimal dicapai.

Sedangkan solusi yang diperlukan adalah perlunya komitmen pimpinan untuk implementasi pengarusutamaan gender dalam pembangunan, sehingga kesetaraan dan keadilan gender dapat dicapai.

Painan, 13 Februari 2019
Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak



